



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PASER
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HASANUDDIN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **166986**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.109.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/107 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
2. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
3. Tanah Seluas 1400 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 675 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
5. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/78 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 48 m2/48 m2 di KAB / KOTA TANAH BUMBU, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 227 m2/150 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/64 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 1.035 m2/25 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
11. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp.



41.000.000

12. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/95 m2 di KAB / KOTA

PASER, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

17.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL

SENDIRI Rp. 2.500.000

2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

90.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

287.558.200

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

2.504.058.200

III. HUTANG

Rp.

193.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.311.058.200

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.